

MENCEGAH TERMARGINALNYA BAHASA DAERAH : SEBUAH KAJIAN DARI PERSPEKTIF MULTI KULTURAL DAN POLITIK BAHASA DI INDONESIA

I Nengah Astawa, Ni Luh Sukanadi, I Nyoman Adi Susrawan, IGAP Tuti Indrawati

¹Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris,

²Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

e-mail : nengahastawa13@gmail.com, luhsukanadi@yahoo.co.id, adisusrawan@unmas.ac.id

ABSTRAK

Banyak orang sangat sangat khawatir akan bahasa daerahnya karena setiap tahunnya pengguna bahasa daerah diperkirakan terus semakin berkurang. Jika saja para penggunanya tidak mengambil langkah-langkah yang signifikan dalam menanggulangi kepunahannya, di masa depan kita akan dikecam oleh para generasi mendatang karena dianggap tidak bisa menjaga kekayaan sebagai warisan budaya. Punahnya bahasa daerah disebabkan oleh beberapa hal antara lain : hegemoni bahasa asing terhadap bahasa daerah. Bahasa asing dianggap mampu secara ekonomi lebih menguntungkan terlebih lagi dikaitkan dengan daerah tujuan wisata, sedangkan bahasa daerah kurang mampu memberikan kesejahteraan yang lebih menjanjikan dibandingkan dengan bahasa asing tertentu seperti bahasa Inggris misalnya. Banyak orang dari Nusantara atau bahkan dunia datang ke daerah tujuan wisata untuk mengadu nasib mereka. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar, mereka tidak merasa berdosa sama sekali tidak menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Di perkotaan dan sekitarnya, bahasa yang dipakai di sekolah-sekolah sebagai bahasa pengantar adalah bahasa Indonesia. Keadaan ini mempercepat kematian bahasa daerah mereka. Untuk mencegah kepunahan akan bahasa daerah, peranan para birokrat atau para politisi sangat krusial dalam mencegah termarginalnya atau kepunahan bahasa daerah. Tindakan yang nyata yg bisa dilakukan antara lain dengan melakukan aktifitas budaya yang memberikan ruang untuk menggunakan bahasa daerah, melalui pendidikan baik formal maupun informal dan juga melalui perundang-undangan

Kata kunci : multi kultural, pluralistis, hegemoni

Abstract

Many people are exceedingly anxious of their own local languages, since every year it is estimated that the users of the languages are becoming surprisingly less and less. If the language users do not do some significant efforts in preventing the Language Loss, in the future we are to be blamed by the future generation of being irresponsible in preserving the local Languages as our ancestors' valuable heritages. The possibility of the local Language loss is due to some phenomena, such as: the hegemony of some foreign languages. The languages mentioned economically are able to give better lives especially if associated with certain regions as prominent tourism destinations; whereas Local Languages are unable to promise such better welfare. Many people from all parts of Indonesia, even all over the world come to tourist destinations to earn their living. To be able to communicate well enough with them, the local people speak Indonesian without feeling sinful of not using their own languages. Furthermore, especially in towns or city and its surroundings, the language used at schools to transfer knowledge from kindergarten up to colleges is Indonesian. This condition, to some extent, may quicken the death of the Local Languages. To prevent the Local Languages from their loss, the elites or political elites play important roles in coping with such a phenomena. The concrete actions which might be proposed are through cultural activities, education either formal, non-formal and also through the implementation of formal and informal laws.

Keywords: multi kultural, pluralistis, hegemony, Intelektual organik, glotto ekonomi.

PENDAHULUAN

Sungguh mencengangkan bila kita mencermati catatan dari UNESCO di mana dikatakan hampir sepuluh bahasa daerah setiap tahunnya di dunia mengalami kepunahan karena berbagai sebab dan diperkirakan pada abad ini kepunahan

bahasa daerah akan terjadi lebih cepat lagi (Bambang Kaswanti Purwo, 2000)

Mengetahui kenyataan seperti itu, kita jadi berfikir : Akankah bahasa daerah yang kita junjung tinggi sebagai warisan budaya leluhur kita yang adiluhung akan mengalami nasib yang sama seperti di atas, Sudah tentu tidak.

Perkembangan zaman yang begitu pesat ditambah lagi dengan semakin berkembangnya suatu daerah menjadi daerah tujuan wisata seperti Bali, Lombok, Sumbawa, Sulawesi dan daerah-daerah lainnya tentu akan menarik minat para pendatang baik dari negeri sendiri ataupun dari luar negeri untuk ikut mengais rezeki mendapatkan lezatnya kue pariwisata di daerah petro dolar. Mereka datang dan bersosialisasi dengan membawa budaya dan bahasa mereka masing-masing. Budaya termasuk juga bahasa yang dibawa para pendatang (*outsiders*) jelas saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam hal ini yang kuat akan mempengaruhi yang lemah.

Bahasa daerah yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari seperti bahasa Sasak di Lombok, Bahasa Samawa di Sumbawa, bahasa Bali di Bali dan sebagian juga di Lombok dan bahasa-bahasa daerah lainnya di Indonesia, terutama di kota-kota dan sekitarnya tergeser oleh bahasa Indonesia. Bisa kita lihat dewasa ini banyak anak-anak di kota-kota dan sekitarnya tidak mampu menggunakan bahasa daerahnya, mereka merasa asing di daerahnya sendiri. Keadaan ini diperparah lagi dengan digunakannya bahasa Indonesia di sekolah-sekolah formal mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi sebagai bahasa pengantar dalam mentransfer pengetahuan kepada anak didik.

Tampaknya benar apa yang dikatakan oleh Breton bahwa cara yang paling baik untuk mematikan sebuah bahasa adalah dengan mengajarkan bahasa lain kepada anak didik (Breton dalam Bambang Kaswanti Purwo, 2000). Ini berarti bahwa bila anak didik tidak diajarkan bahasa daerah mereka akan melupakannya karena bagi mereka bahasa daerah tersebut tidak mempunyai relevansi dalam pencapaian akademik di sekolah. Bagi murid-murid mungkin penggunaan bahasa daerah tidak begitu penting, cukup hanya dengan bahasa Indonesia mereka sudah bisa bersosialisasi dengan sebagian besar lapisan masyarakat yang sangat pluralistis dengan multikulturalnya. Sikap-sikap seperti ini ikut serta memberikan andil yang sangat besar dalam mempercepat kematian bahasa daerah. Jadi apa yang dikatan Breton di atas sangat benar adanya.

Di perkotaan khususnya, di mana masyarakatnya terdiri dari berbagai etnis, suku, agama, dengan kata lain masyarakat yang sangat multikultural, para penentu kebijakan di sekolah-sekolah apakah itu di tingkat taman kanak-kanak atau sekolah dasar cenderung mengambil sikap yang praktis pragmatis saja. Mungkin juga bagi para pengambil kebijakan ada perasaan yang dilematis : memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar atau meninggalkan bahasa daerah secara total karena banyak murid tidak mengerti bahasa daerah. Dipakainya bahasa Indonesia di sekolah sebagai bahasa pengantar dengan asumsi supaya tidak merepotkan guru, toh sebagian besar mereka, bahkan mungkin yang tinggal di perkotaan, 100 % sudah paham dengan bahasa Indonesia. Sangat ironis memang, padahal pada hasil sensus tahun 1988 dinyatakan bahwa hanya 10 % orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari (Adiwisno, dalam Bambang Kaswanti Purwo, 2000). Tapi itulah fakta di lapangan!

Dengan memahami latar belakang seperti diuraikan di atas tidaklah berlebihan jika suatu saat bahasa daerah, cepat atau lambat, (entah bahasa daerah yang mana yang paling dahulu menuju kepunahan) akan menuju ambang kematian atau termarginalisasi. Kalau sudah demikian kita akan kehilangan warisan budaya leluhur kita yang adiluhung yang tak ternilai harganya. Kita tinggal meratapi sisa-sisa kesedihan yang tak terperi yang kita ciptakan sendiri secara sadar atau tidak tapi tidak mampu berbuat sesuatu untuk mencegahnya.

METODE

Dalam tulisan ini penulis memakai metode kepustakaan dengan membaca sejumlah literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikemukakan. Di samping itu digunakan metode observasi atau pengamatan langsung secara empiris dalam realita kehidupan bermasyarakat sebagai penutur bahasa baik yang bersifat formal maupun informal. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif argumentatif.

PEMBAHASAN

Bahasa Daerah dalam Masyarakat yang Multi Kultural

Perkembangan mobilitas penduduk sebagai konsekuensi dari perkembangan jaman yang sangat dinamis menjadikan suatu daerah menjadi daerah yang heterogen pluralistis dengan multi budaya atau dalam istilah sekarang disebut dengan multi kultural. Masyarakat seperti ini sangat lumrah kita lihat di perkotaan dan juga di daerah-daerah tujuan wisata tempat mereka menumpukan mimpi indah dalam mengais manisnya kue rezeki pariwisata. Mereka, para pendatang (*outsiders*) sudah tentu membawa suku, agama, adat istiadat maupun bahasa dari mana mereka berasal. Keanekaragaman suku, ras, agama maupun bahasa yang ada di daerah tersebut akan membawa konsekuensi keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh masing-masing pendukung budaya tersebut. Keanekaragaman ini bersinergi positif dan tidak jarang pula bersinergi negatif yang sangat mungkin menimbulkan friksi konflik di masyarakat yang multikultural kalau konflik-konflik tersebut tidak bisa dikelola sebagaimana mestinya. Friksi ini bisa dalam bentuk persaingan antar bahasa yang ingin saling berhegemoni dalam masyarakat multikultural.

Sudah pasti, budaya dari masing-masing suku, ras atau agama tidak bisa dihindari akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kebudayaan yang kuat akan lebih mudah mempengaruhi yang lemah, tidak terkecuali juga berlaku pada bahasa dari masing-masing pendukung budaya tersebut.

Banyak daerah, sebut saja Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa dan lain-lain terkenal sangat toleran dan terbuka terhadap para pendatang. Dengan sikap toleransi dan keterbukaan ini jelas mempunyai konsekuensi di mana penduduk setempat mempunyai peluang besar akan terpenetrasi dengan unsur-unsur budaya lain yang dibawa dari luar.

Pada umumnya daerah tujuan wisata di Indonesia dibanjiri oleh eksodus penduduk hampir seluruh wilayah Indonesia yang ingin mencoba mengadu keberuntungan dalam mengais nikmatnya kue pariwisata dengan gelimangan dolar. Sudah tentu banyak wisatawan baik dari nusantara maupun manca negara (kalau situasi lagi kondusif tentunya) datang ke

daerah tersebut untuk menikmati indahnya pesona alam dan budaya yang unik yang mungkin bisa ditawarkan kepada mereka. Tidak bisa disangkal memang, dengan kedatangan orang-orang dari luar, termasuk juga para wisatawan, tidak bisa terelakkan akan terjadi penetrasi budaya diantara masing-masing pendukung budaya itu sendiri. Dalam bersosialisasi baik urusan sosial maupun ekonomi dan lain-lain mereka memerlukan bahasa sebagai alat komunikasi. Dalam hal ini masyarakat setempat, sebagai pendukung utama bahasa daerah setempat, agar bisa berkomunikasi dengan masyarakat yang berasal dari luar daerahnya yang belum mampu berkomunikasi dengan bahasa daerah setempat, sedikitpun tidak merasa bersalah pada dirinya untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam kontak sosialnya. Memang itu sah sah saja karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, bahasa negara resmi. Dengan penggunaan bahasa Indonesia secara terus menerus, terutama di perkotaan, mereka menjadi terbiasa berbahasa Indonesia dan kemungkinan besar akan melupakan bahasa daerahnya, atau setidaknya mereka menemukan kesulitan dalam menggunakan bahasa daerahnya. Ironis memang. Secara empiris banyak kasus seperti ini sudah sangat jelas di depan mata kita pada masyarakat yang pluralistis multikultural. Memang penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat yang pluralistis tidak bisa dihindari, ia mampu menghilangkan sekat-sekat budaya khususnya dalam hal kebahasaan.

Bahasa Asing ada di Kamar Kita; Ancaman Terhadap Bahasa Daerah

Pariwisata tidak dapat dipungkiri mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya terlepas dari efek negatif yang bisa ditimbulkannya dari pariwisata itu sendiri. Dengan demikian, penguasaan bahasa asing, setidaknya bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, akan sangat mendukung dalam berkiprah di dunia pariwisata.

Kontek zaman pada saat ini dicirikan dengan derasnya arus informasi sehingga pengaruh bahasa asing sangat terasa. Bahasa asing ada di mana-mana, bahkan ia ada di kamar tidur. Bahasa daerah yang merupakan

jati diri penduduk setempat sebagai pendukung utama budayanya mengalami ancaman, terutama akibat makin banyaknya mereka mempelajari bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, Korea, Mandarin, Rusia, Prancis dan lain-lain. Jadi, jelaslah sudah bahwa bahasa asing sangat berpeluang besar sebagai ancaman dalam ikut mempercepat termarginalnya bahasa daerah yang lambat laun bisa menuju ambang kematian suatu bahasa daerah. Apalagi ada anggapan dari sebagian orang yang berpendapat bahwa dengan menguasai bahasa asing menjadikan mereka lebih percaya diri, lebih bonafid. Malah yang berfikir lebih ekstrim lagi dengan mengatakan “untuk apa mempelajari bahasa daerah karena bahasa daerah tidak mampu menjanjikan masa depan yang cerah secara ekonomis.

Pendapat di atas sesuai pula dengan apa yang dikatakan oleh Phillipson dalam teori *glottoekonomi (glottoeconimics)* (Phillipson dalam A Chaedar Alwasilah, 1997:29). Teori ini bisa membantu kita memahami kaitan antara bahasa dengan kekuatan sosioekonomi pemakai bahasa. Bahasa dipergunakan oleh mereka karena mereka mendapatkan keuntungan ekonomi dari bahasa itu sendiri, bahasa Inggris misalnya. Bahasa itu memiliki fungsi produktif ekonomis, yaitu dengan menguasai keterampilan bahasa Inggris seseorang mendapatkan kemudahan ekonomi dalam dunia teknologi maupun non-teknologi. Teori ini diperkuat pula dengan pendapat Haugen yang mengatakan bahwa bahasa juga merupakan komoditi dalam pasar bahasa dan ia hanya hidup sepanjang bahasa tersebut ada pelanggannya atau pemakainnya. Inilah salah satu ciri ekologi bahasa yang memandang bahwa bahasa yang memiliki kekuatan pasar akan mempunyai pengaruh yang besar dalam masyarakat, sehingga keberlangsungan bahasa tersebut dapat dijamin (Haugen dalam Ngurah Bagus, 2001). Lalu bagaimana dengan bahasa daerah ? ; bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Sasak, Bahasa Samawa, bahasa Flores dan lain-lain. Tentu masyarakat sebagai penutur dan pendukung bahasa daerah tersebut mesti berusaha agar bahasa daerah juga mempunyai kekuatan pasar. Untuk itu pemikir-pemikir yang

disebut sebagai intelektual organik, (pinjam istilah Bapak Ngurah Bagus) kaum cendekiawan, sangat dibutuhkan.

Kebijakan Birokrat Sekolah dalam Penggunaan Bahasa Pengantar

Keadaan yang bisa memperparah percepatan termarginalnya atau kepunahan suatu bahasa daerah dengan adanya perencanaan secara sistematis penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Kebijakan pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar tanpa disadari telah menyingkirkan bahasa daerah atau bahasa ibu (Bambang Kaswanti Purwo, 2000). Monopoli bahasa yang dipakai dalam pengajaran di sekolah tidak hanya menyebabkan kepunahan bahasa (*language loss*) atau kematian bahasa (*language coalence*) bahasa-bahasa lain, tetapi juga penderitaan penutur aslinya. Bahasa daerah diyakini sebagai sebuah alat yang dapat mengungkapkan emosi penutur secara tepat.

Kurikulum 1994 memang mengedepankan muatan lokal, namun pembelajaran bahasa daerah masih ditempatkan pada ruang yang sempit. Materi yang ada dalam muatan lokal sering diartikan sebagai pelajaran kerajinan tangan dan keterampilan. Padahal, bila penutur bahasa daerah diberikan kesempatan untuk menguasai bahasa ibunya, maka selanjutnya untuk menguasai bahasa nasional atau bahasa asing dapat dilakukan lebih cepat dan mudah (Bambang Kaswanti Purwo, 2000). Penggunaan bahasa ibu akan memudahkan siswa dalam proses berfikir (*cognitif flexibility*), karena sistem bahasa dalam setiap bahasa ibu dapat membantu siswa berfikir sistematis.

Globalisasi mengisyaratkan sebuah urgensi untuk mengembangkan suatu kompetensi sejangat. Segala aspek kehidupan manusia harus dikembangkan, sehingga informasi yang melekat padanya dapat disebarkan secara cepat dan tepat ke seluruh pelosok dunia. Demikian halnya bahasa daerah. Berita tentang cipta, karsa manusia perlu disebarkan secara luas dan tepat. Perlu disadari bahwa bahasa daerah bukan hanya sebagai fitur kebahasaan, tetapi juga sebagai fitur kebudayaan (Granoka, 2000). Bahasa daerah bukan hanya merupakan sebuah kenyataan linguistik, tetapi juga

sebuah kenyataan sosiolinguistik. Dengan demikian harus dapat diupayakan agar aspek sosiokultural bahasa daerah dapat dilestarikan. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa akar pelestarian budaya daerah terletak pada bahasa daerah itu sendiri (Ardika, 2000).

Peranan Birokrat dan Politisi dalam Mencegah Termarginalnya Bahasa Daerah

Pernyataan Yudi Latif dan Ibrahim rasanya menarik untuk direnungkan oleh kita semua sebagai pendukung setia bahasa daerah. Mereka mengatakan bahwa sepanjang masa selalu saja ada pihak-pihak yang memuliakan bahasa dan ada pula pihak-pihak yang menyestakannya (Yudi Latif ; Idi Subandy Ibrahim, 1996). Pernyataan itu berimplikasi bahwa ada persaingan diantara bahasa-bahasa dengan tujuan-tujuan tertentu. Begitu juga halnya dengan bahasa daerah. Dalam masyarakat yang pluralistis multikultural ia terus berusaha saling mempengaruhi untuk terus bisa bertahan, untuk terus bisa sebagai pemenang dalam persaingan untuk tetap bereksistensi. Namun seperti teori glottoekonomi yang dikemukakan Phillipson bahwa hanya bahasa yang mempunyai kekuatan pasar secara ekonomi yang akan memenangkan persaingan karena ia mampu memberikan kehidupan, mampu menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik secara ekonomi.

Menyadari hal itu, bahasa daerah agar tidak terus menerus termarginalkan apalagi sampai menuju keambang kematian atau kepunahan peranan seluruh lapisan masyarakat yang peduli dengan bahasa daerahnya mesti mengambil langkah-langkah yang konkrit untuk mencegah keadaan yang semakin memburuk. Dalam hal ini *political will*, kemauan dari aparat atau birokrat mulai dari tingkat yang paling bawah, tingkat dusun atau banjar-banjar sampai pada tingkat yang paling tinggi secara hirarkis, tingkat pusat, sangat ditunggu-tunggu. Para birokrat mempunyai wewenang yang sangat luas untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan yang diharapkan mampu untuk mencegah termarginalnya bahasa daerah. Sangat banyak yang dapat mereka lakukan untuk itu, sudah tentu kalau ada kemauan yang keras ke arah

itu. Tapi kita yakin karena masih banyak para birokrat kita yang masih mempunyai hati nurani, mencintai budaya mereka sendiri, termasuk bahasa daerahnya. Kalau tidak ada kemauan, dengan pertimbangan tertentu, apalagi ditambah dengan keengganan penuturnya untuk memakainya, cepat atau lambat, budaya kita yaitu bahasa daerah yang merupakan mutiara warisan leluhur yang tidak ternilai harganya akan menuju ke ambang kematian. Sungguh sangat menyedihkan.

Beberapa tindakan konkrit yang mungkin bisa dilakukan oleh para birokrat dan jajarannya adalah melalui jalur kebudayaan dan perundang-undangan atau peraturan lainnya, dan juga melalui jalur pendidikan. Melalui jalur pendidikan, hal ini bisa dilakukan dengan cara mengadakan pembinaan-pembinaan bahasa yang dikaitkan dengan kebudayaan daerah melalui berbagai media antara lain memperbanyak pementasan-pementasan atau pertunjukan kesenian dengan media bahasa daerah yang dapat memikat banyak penonton seperti pertunjukan drama gong (Bali), Ludruk (Jawa Timur), ketoprak (Jawa Timur dan Jawa Tengah), wayan kulit (Bali, Jawa, Lombok) atau pertunjukan Drama Kolosal Putri Mandalika (Lombok) atau pertunjukan lawak atau ketoprak humor dan lain-lain yang mampu membius para penonton. Pertunjukan ini di samping dipertunjukkan di desa-desa juga di perkotaan dan hendaknya ditayangkan lewat televisi karena dewasa ini sangat diyakini televisi mempunyai pengaruh yang sangat besar kepada pemirsa. Juga berikan rangsangan-rangsangan dan motivasi kepada kelompok-kelompok atau perkumpulan, perkumpulan yang berkiprah dalam melestarikan budaya, khususnya bahasa daerah.

Baik di desa maupun di perkotaan harus diupayakan sedapat mungkin dalam rapat-rapat perkumpulan pemuda-pemudi dibiasakan untuk memakai bahasa daerah. Bila diperlukan buatlah aturan agar dalam setiap rapat bahasa daerah wajib dipakai. Hal ini akan sangat membantu mencegah termarginalnya bahasa daerah yang kita cintai. Memang pada mulanya susah, tetapi ingat bukankah perjalanan yang seratus kilometerpun dimulai dari satu langkah, Ada baiknya juga dalam seminar, diskusi

dan forum-forum lainnya sepanjang itu menyangkut budaya daerah dan secara teknis memungkinkan hendaknya digunakan bahasa daerah agar bahasa daerah semakin populer.

Di samping melalui kebudayaan, juga melalui jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Melalui pendidikan non-formal bisa dilakukan dengan memberikan kemudahan-kemudahan oleh para birokrat dalam pengurusan ijin untuk mendirikan kursus-kursus, pembinaan-pendinaan seperti misalnya kursus pembawa acara dalam bahasa daerah, kursus berpidato dalam bahasa daerah, menyanyi lagu-lagu daerah. Pemerintah daerah hendaknya sebagai fasilitator dalam memberikan wadah kreatifitas seperti misalnya dalam perlombaan-perlombaan yang menggunakan bahasa daerah sebagai medianya entah itu dalam bentuk apapun.

Yang paling mudah dilaksanakan karena kewenangan yang dimiliki oleh para penentu kebijakan kita di birokrat adalah memalui pendidikan formal. Idealnya di sekolah-sekolah umum bahasa daerah bisa diterapkan mulai dari sekolah dasar kelas satu bahkan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan kelas tiga sekolah dasar. Ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 2 tahun 1989, Bab XI, pasal 42, ayat 1 yang berbunyi, bahasa daerah dapat digunakan sebagai pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/ketrampilan tertentu.

Mengacu pada undang-undang Nomor 2 tersebut di atas, secara jelas *language human right* (hak azasi bahasa) sudah dicantumkan di sana. Idealnya, anak sebenarnya sudah diberikan bahasa daerah agar dapat secara dini mengenal bahasa ibunya. Masalahnya sekarang adalah di perkotaan di mana masyarakatnya sangat hetrogen, multi kultural, bahasa daerah tidak dipakai sebagai bahasa pengantar dan bahasa daerah cenderung diganti dengan bahasa Indonesia. Jelaslah di sini kesempatan untuk mendapatkan *language human right*, hak anak untuk mendapatkan bahasa ibu dirampas. Mulai saat ini bahasa daerah sudah dimarginalkan.

Dengan demikian hendaknya para elit penentu kebijakan sudah saatnya sebelum terlambat bisa membuat seperangkat aturan untuk memberikan jaminan hukum terhadap pelestarian bahasa daerah. Perlu dibuat aturan-aturan dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan-peraturan lain yang bersifat mengikat sebagai dasar acuan hukum dalam menjalankan aktifitas. Pelanggaran terhadap peraturan ini harus ada sanksinya dan diterapkan dengan tidak pandang bulu. Pemerintah Kabupaten maupun pemerintah Propinsi, dengan adanya otonomi daerah di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang sangat luas dalam mengatur dirinya sendiri. Mengapa peluang emas ini dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian bahasa daerah tidak dimanfaatkan oleh para penentu kebijakan, oleh para elit birokrat ataupun para elit politik di mana saat ini masih ada kesempatan untuk berbuat yang terbaik untuk masyarakat? Sekaranglah saat yang paling tepat untuk menyumbangkan sisa-sisa pemikiran untuk sebuah kebaikan pada saat kita masih bisa mandi sendiri karena tidak akan lama lagi mungkin kita akan dimandikan oleh orang banyak.

Dengan aturan formal yang dibuat, penggunaan bahasa daerah bisa diwajibkan mulai dari tingkat pendidikan yang paling bawah sampai yang paling tinggi, sudah tentunya untuk keterampilan-keterampilan tertentu, tidak mesti harus semuanya karena kita sadar betul bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk perekat persatuan bangsa juga penting dan harus difikirkan secara bersama-sama. Kalau sudah ada aturan seperti itu para pengelola pendidikan mesti harus menindaklanjutinya. Dan ini akan berimplikasi sangat positif bagi perkembangan bahasa daerah itu sendiri. Jadi para elit penguasa sebagai penentu kebijakan mempunyai peranan yang sangat-sangat strategis dalam ikut memikirkan agar bahasa daerah tidak terpinggirkan atau tidak mati ditelah oleh keganasan dan kekejaman modernitas yang tak sanggup kita bendung sendiri.

Perlu diingat dan direnungkan dalam-dalam : siapa lagi yang akan melestarikan bahasa daerah kita kalau bukan

kita sendiri, sebagai penutur-penutur bahasa daerah? Penutur bahasa daerah, dengan membiasakan diri memakai bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari sudah termasuk menunjukkan sikap yang positif terhadap bahasa daerah itu sendiri. Pengajaran di sekolah tidak cukup mampu untuk melestarikan bahasa daerah itu. Ini sesuai dengan teori Fisman (dalam Ngurah Bagus, 2000) yang mengatakan bahwa pengajaran bahasa di sekolah-sekolah tidak menjamin bahasa itu dapat dipertahankan. Undang-undang tidak akan menjamin pelestarian bahasa sepanjang penuturnya terkena penyakit apa yang disebut dengan *dislokasi generasi* di mana satu generasi tidak mengajarkan bahasanya kepada anak cucunya. Dengan kata lain ada rasa enggan menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Untuk itu sudah saatnya segenap komponen masyarakat sebagai pendukung bahasa daerah berusaha mengkampanyekan, mengadakan propaganda agar bahasa daerah kita tidak punah seperti pada bahasa-bahasa daerah di Australia. Kalau sampai punah, generasi kini lah yang menanggung dosa-dosa akibat hilangnya sebuah warisan budaya, karena secara kultural bahasa daerah merupakan simbol masyarakat.

SIMPULAN

Dari apa yang telah diuraikan secara panjang lebar di atas dapat ditarik kesimpulan seperti di bawah ini.

Eksistensi beberapa bahasa daerah dewasa ini sudah sangat memprihatinkan. Ini bisa dilihat di mana jumlah penutur bahasa daerah setiap tahunnya cenderung menurun (Alwi Hasan, 1998) Menurunnya jumlah penutur bahasa daerah ini tidak terlepas dari imbas atau pengaruh modernisme yang hampir merambah pada seluruh aspek kehidupan. Salah satu dari kemajuan modernisme itu adalah adanya masyarakat yang pluralistis multikultural, di samping juga adanya pengaruh media lain seperti radio, televisi dan media-media lainnya yang juga punya andil yang cukup besar ikut mempercepat proses termarginalnya bahasa daerah

Pada masyarakat perkotaan yang sangat majemuk (pluralistis/multikultural) sering terjadi kesulitan dalam bersosialisasi. Kemudian, secara praktis pragmatis, pilihan bahasa pada akhirnya jatuh pada bahasa

Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam masyarakat yang multikultural seperti di perkotaan di Indonesia eksistensi bahasa daerah semakin terpuruk dan memperhatikan.

Dengan diterapkannya otonomi daerah dan reformasi di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang sangat besar untuk mengatur daerahnya sendiri, ini merupakan angin segar dan ada secercah harapan untuk mencegah termarginalnya bahasa daerah. *Political will* (niat baik) dari para penentu kebijakan dari para elit birokrat dan elite politik sangat ditunggu-oleh masyarakat karena mereka mempunyai peranan yang sangat strategis untuk menghasilkan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pelestarian bahasa daerah.

Untuk mengantisipasi agar kematian bahasa daerah jauh dari bayang-bayang kenyataan, sudah sepatutnya segenap komponen masyarakat penutur bahasa daerah: para birokrat, para elit politik, para intelektual organik, dan lain-lain mengambil langkah-langkah konkrit. Langkah-langkah konkrit ini bisa lewat jalur kebudayaan, pendidikan formal dan non-formal dan juga lewat peraturan-peraturan. Kesemuanya ini diharapkan mampu mencegah percepatan termarginalnya atau kepunahan bahasa daerah. Namun satu hal yang pasti, siapa yang menguasai bahasa dialah yang menguasai sejarah. Maka rebutlah dan berdayakan

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, 1998. *Bahasa Sebagai Jati Diri Bangsa*, dalam Kongres bahasa Bali IV. Penyunting I Made Purwadkk. Denpasar: Balai Penelitian Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Alwasilah Chaedar, A., 2000. *Politik Bahasa dan Pendidikan*, Bandung: PT. Rosdakarya.
- Anderson, R. dan K. Cusher. 1994. *Multicultural and Intercultural Studies dalam Teaching Studies of Society and Environment*. Sydney: Prentice Hall.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 2001. *Reformasi Multikulturalisme dan Masalah*

- Politik di Indonesia*. Denpasar : Makalah Seminar
- Bagus , I Gusti Ngurah dan Aron Mko Mbete. 1996. *Kedwibahasaan di Bali*. Bandar Sri Begawan : Universitas Darusalam.
- Fishman, J.A. 1971. *The Relationship between Micro and Macro Sociolinguistics in the Study of Who Speaks What Languages to Whom and When*. New Zealand : Penguin
- Granoka, Ida Wayan Oka. 2000. *Divya Sabdha Tentukan Kondisi Bahasa Bali Dewasa ini dan Kesiapan Menghadapi Tantangan Masa Depan*. Denpasar : Makalah Pramasta Bali.
- Kaswanti Purwo, Bambang. 2000. *Bangkitnya Kebhinekaan Dunia Linguistik dan Pendidikan*. Orasi Ilmiah pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Linguitik FKIP Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya pada 10 November 2000. Jakarta : Mega Media Abadi.
- Kaswanti Purwo, Bambang.2000. *Bahasa Nasional Bisa Punahkan Bahasa Ibu*. Media Indonesia, Tanggal 11 Nopember 2000:19. Jakarta : Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdiknas.
- Mughni, Syafiq A.2008. Pendidikan Berbasis Multikulturalisme dalam Choirul Mahfud, Pendidikan Multikultural. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yudi Latif; Idi Subandi Ibrahim.1996. *Bahasa dan Kekuasaan. Politi Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung : Penerbit Mizan.